



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 171 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN TOSARI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tosari sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
TOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tosari untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Tosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Tosari Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tosari dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Tosari dan tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Tosari Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Tosari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Tosari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Tosari dalam menyusun RKA Kecamatan Tosari.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 171

BERITA ACARA
VERIFIKASI RENJA 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOSARI

URAIAN		CATATAN HASIL VERIFIKASI
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	Sesuai
1.2	Landasan Hukum	sesuai
1.3	Maksud dan Tujuan	sesuai
1.4	Sistematika Penulisan	sesuai
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	<p>Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang tabel T-C.29 (Tabel 2.1) - Kurang tabel Tabel 2.1.A
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tabel T-C.30
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

URAIAN		CATATAN HASIL VERIFIKASI																									
	dan Kegiatan Masyarakat																										
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH																										
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah																									
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	<p>Tambahkan tabel Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024</p> <p style="text-align: center;">Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tujuan/Sasaran/SPM/IKK</th> <th>Indikator Kinerja</th> <th>Realisasi 2022</th> <th>Proyeksi 2023</th> <th>Target 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra 2024-2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPM (Standar Pelayanan Minimal)</td> <td>... (jika ada)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indikator Kinerja Kunci (outcome)</td> <td>... (jika ada)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tujuan/Sasaran/SPM/IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra 2024-2026					...					SPM (Standar Pelayanan Minimal)	... (jika ada)				Indikator Kinerja Kunci (outcome)	... (jika ada)			
Tujuan/Sasaran/SPM/IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024																							
Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra 2024-2026																											
...																											
SPM (Standar Pelayanan Minimal)	... (jika ada)																										
Indikator Kinerja Kunci (outcome)	... (jika ada)																										
3.3	Program dan Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian NSPK dan SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.																									
		Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan. - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.																									
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Kurang tabel T-C.33 (Tabel 4.1)																									
BAB V	PENUTUP	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan																									
-	TABEL T-C.19 untuk RKPD	Kaidah-kaidah pelaksanaan																									
		Rencana tindak lanjut.																									

CATATAN : PERBAIKAN DISAMPAIKAN DUA (2) HARI SETELAH VERIFIKASI KEPADA VERIFIKATOR.

KECAMATAN TOSARI

ttd.

ATIK INDAH L

Pasuruan, 3 Mei 2023

Verifikator

ttd.

IRMA WIDIASTUTI

RENCANA KERJA
KECAMATAN TOSARI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita - citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 3 (tiga) tahun dan

rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Tosari merupakan Penjabaran tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas - tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Untuk mewujudkan rencana tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk tujuan. Sesuai dengan peran Kecamatan Tosari, tujuan OPD Kecamatan Tosari adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan”** dengan indikator **“Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

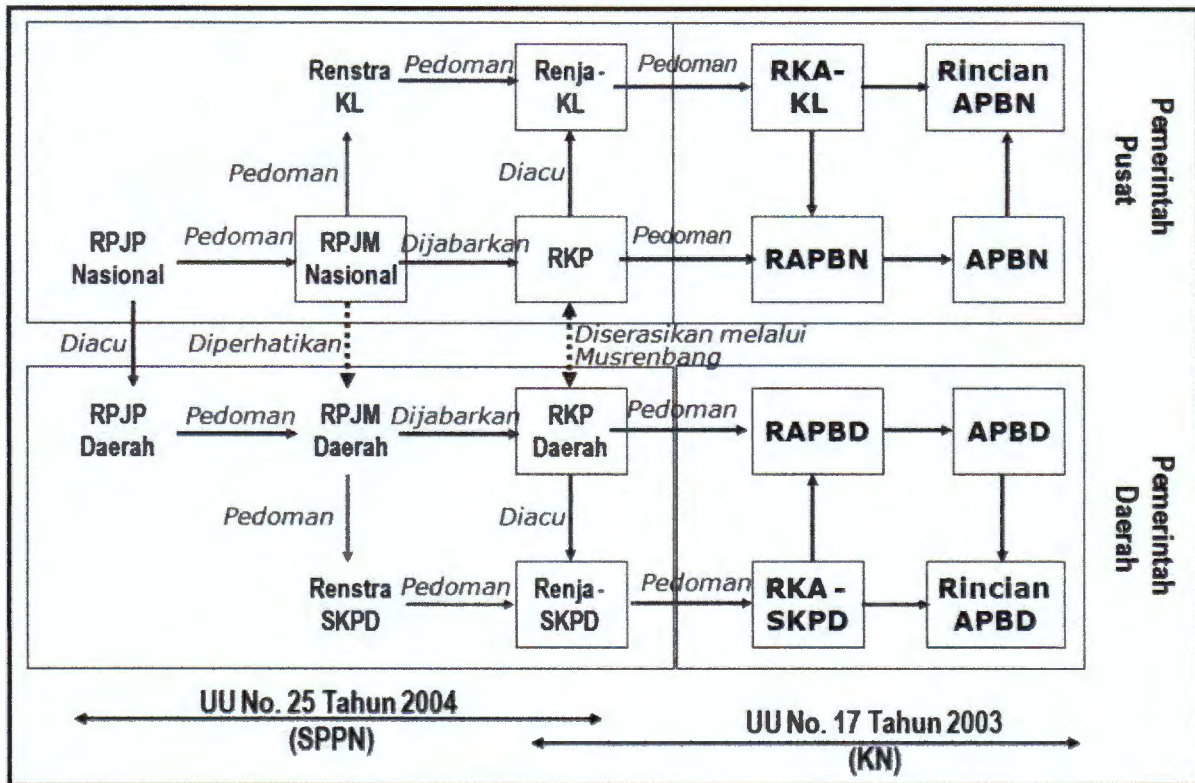
1. Meningkatkan Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Tosari Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun Tentang RPD Kabupaten Pasuruan
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;

2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Tosari disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOSARI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tosari Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Tosari

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Tosari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut :

	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	71 unit	55 unit					55 unit	
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	2 unit - 2 kali	2 unit - 1 kali					2 unit - 1 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Yang Terpelihara	1 unit - 2 kali	1 unit - 1 kali					1 unit - 1 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas camat	12 Bulan	12 Bulan					12 Bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	9 unit - 8 kali	9 unit - 4 kali					9 unit - 4 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Dipelihara	2 unit - 2 kali	1 unit - 1 kali					1 unit - 1 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	-						0,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas/Gedung Kantor.	Terpeliharanya rumah dinas camat	-						0,00	
									0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SKM Kecamatan Nilai Sakip Kecamatan	100%						0,00	0,00
	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu	-	-						
	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur								
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Terlaksananya program Fasilitasi pemerintahan kecamatan dengan baik								
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	prosentase desa yang melaporkan keuangan tepat waktu								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur							0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina,Prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	4 kegiatan						0,00	
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	18 dokumen						0,00	
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat								
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	7 dokumen						0,00	
2021 & 2022										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%	100%	100			0,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%		100%	100%	100			0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	15 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor	100%		100%	100%	100			0,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	42 Bln		14 bulan	14 bulan	100			

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium PTT dan Upah THL	36 Bln		12 bulan	12 bulan	100			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	36 Bln		12 bulan	12 bulan	100			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%							0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	4 Kali							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 stel							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan	2 Orang							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Kebersihan Umum Kantor	100%		100%	100%	100			0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis		15 jenis	15 jenis	100			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	15 jenis		15 jenis	15 jenis	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	16 laporan		16 laporan	16 laporan	100			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Koran Dalam Setahun								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100			0,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	3 Unit		1 unit	1 unit	100			
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	3 Unit		-	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100			0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Internet	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna Menunjang Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100			0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100			
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	1 ls		1 ls	1 ls	100			

	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1 ls		-	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	100%		100%	100%	100		0,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 laporan		1 laporan	1 laporan	100		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	3 Laporan		1 laporan	1 laporan	100		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik	100%		100%	100%	100		0,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	6 laporan		1 laporan	1 laporan	100		#VALUE!
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100		#VALUE!
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	100%		100%	100%	100		0,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 laporan		2 laporan	2 laporan	100		#VALUE!
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil kegiatan operasi gabungan	6 laporan		2 laporan	2 laporan	100		#VALUE!
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 kali		6 kali	6 kali	100		#VALUE!

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
2018 - 2020			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	100,32%	1. Belum adanya pendampingan yang optimal secara teknis maupun operasional	1. Perlu adanya peningkatan Pendampingan dan koordinasi yang lebih optimal
Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100,00%		
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan	100,00%	2. Kapasitas SDM Pokmas yang kurang memadai	2. Perlunya peningkatan SDM Pokmas
Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	100,00%		
PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	100,00%		
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	100,00%		
Koordinasi pemberdayaan masyarakat	100,00%		
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesan	100,00%		
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	100,00%		
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100,00%		
2021			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	91,80%		
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67,66%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasionla Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00%		
2022-2023			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88,50%		
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%		

Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Tosari tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 2.349.056.190,- dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.251.871.237,-. Anggaran OPD Kecamatan Tosari terbagi menjadi 33 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. Rp. 2.251.871.237,- atau 95,86% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Tosari dapat diuraikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.	BELANJA DAERAH	2.349.056.190,-	2.251.871.237,-	95,86
5.1.	BELANJA OPERASIONAL	2.332.927.190,-	2.236.121.237,-	95,85
5.1.01	Belanja Pegawai	1.607.312.000,-	1.523.330.145,-	94,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.615.190,-	712.791.092,-	98,23
5.2.	BELANJA MODAL	16.129.000,-	15.750.000,-	97,65
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.129.000,-	15.750.000,-	97,65
	Jumlah Belanja	2.349.056.190,-	2.251.871.237,-	95,86

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran OPD Kecamatan Tosari Tahun 2022 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Tosari sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2022			
		ANGGARAN	REALISASI	%	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	2.349.056.190,-	2.251.871.237,-	95,86	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.205.895.590,-	2.112.561.877,-	95,77	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	538.200,-	538.000,-	99,96	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	538.200,-	538.000,-	99,96	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.449.400,-	1.827.267.545,-	95,55	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.577.387.000,-	1.493.405.145,-	94,68	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	303.000.000,-	301.800.000,-	99,60	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	29.925.000,-	29.925.000,-	100,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	740.400,-	740.400,-	100,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan	1.397.000,-	1.397.000,-	100,00	

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.350.000,-	6.988.862,-	95,09	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.950.000,-	4.950.000,-	100,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.400.000,-	2.038.862,-	84,95	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,-	0,-	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.747.940,-	113.442.776,-	99,73	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.682.800,-	8.674.300,-	99,90	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.132.840,-	3.132.840,-	100,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.750.000,-	1.750.000,-	100,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.774.500,-	21.738.500,-	99,83	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.063.300,-	9.063.300,-	100,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,-	3.600.000,-	100,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.774.500,-	65.483.836,-	99,56	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.379.000,-	14.000.000,-	97,36	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.379.000,-	14.000.000,-	97,36	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.716.000,-	21.705.944,-	75,59	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.716.000,-	21.705.944,-	75,59	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.715.050,-	128.618.750,-	99,93	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	110.454.800,-	110.448.500,-	99,99	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.090.000,-	4.000.000,-	97,80	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.170.250,-	14.170.250,-	100,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.860.000,-	50.010.000,-	92,85	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.860.000,-	50.010.000,-	92,85	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.800.000,-	11.700.000,-	84,78	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.060.000,-	38.310.000,-	95,63	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.190.600,-	71.190.600,-	100,00	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.190.600,-	71.190.600,-	100,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.190.600,-	71.190.600,-	100,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.110.000,-	18.110.000,-	100,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.110.000,-	18.110.000,-	100,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.360.000,-	11.360.000,-	100,00	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	6.750.000,-	6.750.000,-	100,00	
Jumlah		2.349.056.190,-			

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tosari pada tahun 2022, dalam proses pelaksanaan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA), serta berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun laporan capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra (2022)	Realisasi 2022	Selisih
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	100	100	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	100	100	
Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	100	100	
Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70,00	70,27	

Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tosari dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Tosari dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. a Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
 - a. b Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Tosari dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan , maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Tugas Kecamatan Tosari adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Tosari mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;

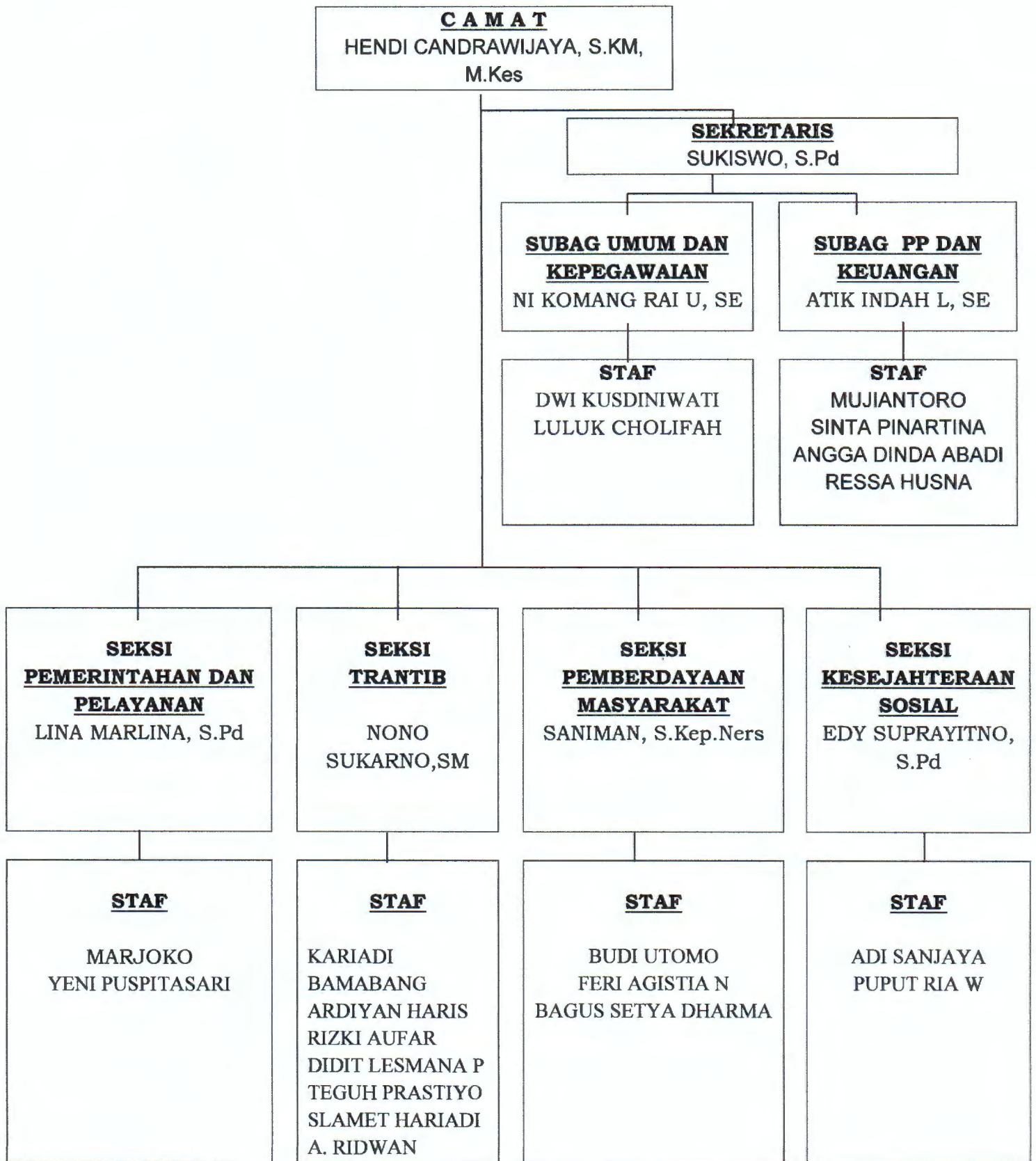
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Tosari dimaksud terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris Camat
 - a. Subag Umum & Kepegawaian
 - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan
- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & fungsi kecamatan adalah :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan

pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub bagian penyusunan program dan keuangan , mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SEKSI PEMERINTAHAN & PELAYANAN

Seksi Pemerintahan & Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koodinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan paeraturan perundang-undangan, penegakan paeartauran perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi deng pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamata;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana & sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan keesjahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat , keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisional yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;

f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tosari yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan
4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan

Sesuai dengan Laporan kinerja instansi Kecamatan Tosari tahun 2022 Kecamatan Tosari telah mencapai target kinerja, sebagai berikut :

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	100	100	-
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	100	100	-

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	100	100	-
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70,00	70,27	-

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tosari meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tosari
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	TUJUAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85,00	90,00			88,97				
B	SASARAN Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas 1 Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah - Nilai SAKIP Kecamatan			70,00	73,00			70,27				
	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan - Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			100%	100%			100%				
	3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan - Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			100%	100%			100%				
	4 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan - Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan			100%	100%			100%				
A	TUJUAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					90,10	90,25	88,97				
B	SASARAN Meningkatnya Hasil Koordinasi 1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Persentase Penyelenggaraan Kecamatan					75,00	78,00	70,27				
	2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Nilai Sakip Perangkat Daerah					100%	100%	100%				

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN TOSARI

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Relevansi					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Ketepatan Dasa/Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7 7 01 X XX 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tosari	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	2.514.250.058	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tosari	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	2.514.250.058	
X XX 01 2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	15.000.000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	15.000.000	
X XX 01 2.01 1	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	
X XX 01 2.01 6	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000	
X XX 01 2.01 6	1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	
X XX 01 2.01	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	2.007.482.459	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	2.007.482.459	
X XX 01 2.01 1	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input : - Bel. Pegawai : 1.630.226.459 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang/bln	1.630.226.459	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input : - Bel. Pegawai : 1.630.226.459 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang/bln	1.630.226.459	
X XX 01 2.01 02	2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 339.240.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	339.240.000	2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 339.240.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	339.240.000	

X XX 01 2.01 03	2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Outcome : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 38.016.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen Outcome : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	38.016.000		2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Outcome : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 38.016.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 12 Dokumen Outcome : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	38.016.000	
X XX 01 2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	80.000.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	80.000.000
X XX 01 2.03 6	3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Paket Outcome : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000		3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Paket Outcome : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
X XX 01 2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	37.500.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	37.500.000
X XX 01 2.05 2	4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15.000.000		4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15.000.000	
X XX 01 2.05 3	4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000		4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000	
X XX 01 2.05 9	4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 4 Orang Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000		4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 4 Orang Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	
X XX 01 2.06	5 Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	158.511.800	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	158.511.800
X XX 01 2.06 1	5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.298.800 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.298.800		5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.298.800 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.298.800	
X XX 01 2.06 2	5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.802.600 Outcome :	8.802.600		5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.802.600 Outcome :	8.802.600	

X	XX	01	2.06	3	5,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.515,600 - Bel. Modal : - Dana : 7.515.600 Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8.802.600	5,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.515,600 - Bel. Modal : - Dana : 7.515.600 Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8.802.600
X	XX	01	2.06	4	5,4	Penyediaan Bahan Logistik	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 23.114.300 - Bel. Modal : - Dana : 23.114.300 Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 4 Paket Outcome : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23.114.300	5,4	Penyediaan Bahan Logistik	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 23.114.300 - Bel. Modal : - Dana : 23.114.300 Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 4 Paket Outcome : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23.114.300
X	XX	01	2.06	5	5,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000,000 - Bel. Modal : - Dana : 15.000.000 Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 4 Paket Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	5,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000,000 - Bel. Modal : - Dana : 15.000.000 Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 4 Paket Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
X	XX	01	2.06	6	5,6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.960,000 - Bel. Modal : - Dana : 3.960.000 Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 12 Dokumen Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	5,6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.960,000 - Bel. Modal : - Dana : 3.960.000 Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 12 Dokumen Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000
X	XX	01	2.06	8	5,7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000,000 - Bel. Modal : - Dana : 15.000.000 Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 12 Dokumen Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	5,7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000,000 - Bel. Modal : - Dana : 15.000.000 Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 12 Dokumen Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
X	XX	01	2.06	9	5,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 67.820,500 - Bel. Modal : - Dana : 67.820.500 Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.820.500	5,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 67.820,500 - Bel. Modal : - Dana : 67.820.500 Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.820.500
X	XX	01	2.06	11	5,9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000,000 - Bel. Modal : - Dana : 10.000.000 Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 12 Dokumen	10.000.000	5,9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000,000 - Bel. Modal : - Dana : 10.000.000 Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 12 Dokumen	10.000.000

			Outcome : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Outcome : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
X XX 01 2.07	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	83.168.016	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	83.168.016	
X XX 01 2.07 5	6,1 Pengadaan Mebelair		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 28.691.660 Dana : Output : Jumlah Paket Mebel yang disediakan Outcome : Tersedianya Mebel	2 Unit	28.691.660	6,1 Pengadaan Mebelair	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 28.691.660 Dana : Output : Jumlah Paket Mebel yang disediakan Outcome : Tersedianya Mebel	2 Unit	28.691.660	
X XX 01 2.07 6	6,2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 27.907.000 Dana : Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Outcome : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	27.907.000	6,2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 27.907.000 Dana : Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Outcome : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	27.907.000	
X XX 01 2.07 10	6,3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 26.569.356 Dana : Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	26.569.356	6,3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 26.569.356 Dana : Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	26.569.356	
X XX 01 2.08	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	39.554.220	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	39.554.220	
X XX 01 2.08 2	7,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 32.054.220 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	32.054.220	7,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 32.054.220 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	32.054.220	
X XX 01 2.08 3	7,2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	7.500.000	7,2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	7.500.000	
X XX 01 2.09	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	173.033.560	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	173.033.560	
X XX 01 2.09 1	8,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 125.032.100 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	125.032.100	8,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 125.032.100 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	125.032.100	
X XX 01 2.09 5	8,1 Pemeliharaan Mebel		Input : - Bel. Pegawai : -			8,1 Pemeliharaan Mebel	Input : - Bel. Pegawai : -			

X XX 01 2.09 6	8,2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	4 Unit	7.500.000	8,2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	4 Unit	10.000.000	8,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.501.460 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.501.460	1 Unit	15.501.460	8,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.501.460 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.501.460	1 Unit	15.501.460	8,4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	1 Unit	15.000.000	8,4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	1 Unit	15.000.000
7 01 02	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tosari	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	100% 3,50	851.141.460	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tosari	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	100% 3,50	851.141.460																				
7 01 02 2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	100%		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	100%																					
7 01 02 2.01 01	1,1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1,2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.893.460 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan Outcome : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 83.660.500 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	15.893.460	1,1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1,2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.893.460 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan Outcome : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 83.660.500 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	15.893.460	12 Dokumen	83.660.500																		
	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Persentase Laporan bulanan PATEH yang Diselesaikan	100%		2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Persentase Laporan bulanan PATEH yang Diselesaikan	100%																					

	yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan		Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEM)			yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan		Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEM)		
	2,1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan Outcome : Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	10.000.000	2,1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan Outcome : Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	10.000.000
	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase Realisasi PBB-P2	100%		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	
	3,1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Outcome : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.000.000	3,1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Outcome : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.000.000
7 01 03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tosari	Perentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	372.745.000	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tosari	Perentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	372.745.000
7 01 03 2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Perentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Perentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
7 01 03 2.01 02	1,1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.097.500 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.097.500	1,1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.097.500 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.097.500
7 01 03 2.01 03	1,2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 31.132.500 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	6 Laporan	31.132.500	1,2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 31.132.500 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	6 Laporan	31.132.500
	2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 orang		2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Perentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 orang	
	2,1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	5.000.000	2,1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	5.000.000

			Outcome : Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku Outcome : terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	50 Keluarga	5.000.000			Outcome : Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku Outcome : terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	50 Keluarga	5.000.000	
7 01 04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tosari	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	165.806.250	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tosari	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	165.806.250	
7 01 04 2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		
7 01 04 2.01 01	1,1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Outcome : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	15.000.000	1,1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Outcome : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	15.000.000	
7 01 04 2.01 02	1,2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.806.250 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat-Harmonisasi Outcome : Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	10.806.250	1,2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.806.250 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Outcome : Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	10.806.250	
	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tosari	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	70.000.000	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tosari	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	70.000.000	
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah		Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah		Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		
	1,1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana		10.000.000	1,1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana		10.000.000	

	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Org			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Org		
			Outcome : Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Outcome : Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tosari	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30.000.000			6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tosari	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30.000.000	
1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Persentase hasil Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%				1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Persentase hasil Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%		
1,1 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan Outcome : Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	8.000.000			1,1 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan Outcome : Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	8.000.000	
1,2 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa Outcome : Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	8.000.000			1,2 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa Outcome : Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	8.000.000	
1,3 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Outcome : Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Laporan	6.000.000			1,3 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Outcome : Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Laporan	6.000.000	
1,4 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan Outcome : Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 Dokumen	8.000.000			1,4 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan Outcome : Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 Dokumen	8.000.000	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kecamatan Tosari adalah Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Kecamatan Tosari maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Tosari harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Tosari yang sejahtera.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tosari bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur
		Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
		Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
		Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan atau diberikan
Sumber data dan informasi	Data yang diberikan sering kali tidak akurat atau tidak valid	Sumber data yang belum valid karena data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda

Adapun isu-isu penting di Kecamatan Tosari dapat dilihat pada table dibawah ini :

ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN TOSARI

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1.	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan yang mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 4. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah 5. Peningkatan sarana dan prasarana
2.	Sektor ekonomi unggulan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang terfasilitasinya sector ekonomi local unggulan dalam hal pelatihan SDM dan pemasaran produk. 2. Kurangnya keterlibatan <i>stakeholder</i> dan pelaku ekonomi terkait. 3. Masih rendahnya peluang pemasaran produk unggulan terutama UMKM 4. Belum meratanya informasi masyarakat terhadap keberadaan UMKM di Kecamatan Tosari
4.	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah 2. Kurangnya edukasi dalam pengolahan tanah 3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga maupun sampah pertanian
5.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur jalan sebagai kelancaran jalur transportasi ekonomi. 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk UMKM dibidang pariwisata.
6.	Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya pernikahan usia dini sehingga mengakibatkan SDM masyarakat kurang. 2. Masih adanya Stunting di Kecamatan Tosari

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Tosari sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN TOSARI

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tosari Tahun 2023 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tosari saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Tosari mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III

TUJUAN , SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Tosari sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tosari adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasoinal guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang

profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik

- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan stratejik ini, maka Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur kebarhasilan badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.

e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Sedangkan Sasaran strategik Kecamatan Tosari merupakan bagian integral dalam proses prancanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran strategis Kecamatan Tosari adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan seperti pada table 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
TUJUAN				
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,97	90,00	
SASARAN				
1 Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	70,27	73,00	
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	100%	100%	
3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	100%	100%	
4 Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan	100%	100%	
TUJUAN				
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90,10
SASARAN				
1 Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan			100%
2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			75,00

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peingkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta implementasi rencana program/kegiatan tahun anggaran 2024 sebagaimana pada table 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Tosari Tahun 2024 dan Prakiraan maju 2025 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN TOSARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UNSUR KEWILAYAHAN								
					KECAMATAN								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Kecamatan Tosari	100%	2.511.289.855			100%	2.762.418.841
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Kecamatan Tosari	100%	15.000.000			100%	16.500.000
X	XX	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tosari	5 Dokumen	5.000.000 a. Belanja Operasi : 5.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000 b. Belanja Modal :	DAU		5 Dokumen	5.500.000
X	XX	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kecamatan Tosari	5 Laporan	5.000.000 a. Belanja Operasi : 5.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000 b. Belanja Modal :	DAU		5 Laporan	5.500.000
X	XX	01	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tosari	2 Laporan	5.000.000 a. Belanja Operasi : 5.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000 b. Belanja Modal :	DAU		2 Laporan	5.500.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kecamatan Tosari	100%	2.007.482.459			100%	2.208.230.705
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tosari	224 Org/Bln	1.630.226.459 a. Belanja Operasi : 1.630.226.459 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : b. Belanja Modal :	DAU		224 Org/Bln	1.793.249.105
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tosari	12 Dokumen	339.240.000 a. Belanja Operasi : 339.240.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 339.240.000 b. Belanja Modal :	DAU		12 Dokumen	373.164.000
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Tosari	12 Dokumen	38.016.000 a. Belanja Operasi : 38.016.000 >Belanja Pegawai : 38.016.000 >Belanja barang & jasa : b. Belanja Modal :	DAU		12 Dokumen	41.817.600
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	Kecamatan Tosari	100%	5.000.000			100%	5.500.000
X	XX	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tosari	12 Laporan	5.000.000 a. Belanja Operasi : 5.000.000	DAU		12 Laporan	5.500.000

										>Belanja barang & jasa :	15.000.000						
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tosari	12 Laporan		a. Belanja Operasi :	67.820.500	DAU		12 Laporan		74.602.550	
										b. Belanja Modal :							
											67.820.500						
										>Belanja Pegawai :	67.820.500						
										>Belanja barang & jasa :	67.820.500						
										b. Belanja Modal :							
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tosari	12 Laporan		a. Belanja Operasi :	10.000.000	DAU		12 Laporan		11.000.000	
										>Belanja Pegawai :	10.000.000						
										>Belanja barang & jasa :	10.000.000						
										b. Belanja Modal :							
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Tosari	100%			83.168.016			100%		91.484.818	
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Tosari	2 Unit		a. Belanja Operasi :	28.691.660	DAU		2 Unit		31.560.826	
										>Belanja Pegawai :							
										>Belanja barang & jasa :							
										b. Belanja Modal :	28.691.660						
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tosari	4 Unit		a. Belanja Operasi :	27.907.000	DAU		4 Unit		30.697.700	
										>Belanja Pegawai :							
										>Belanja barang & jasa :							
										b. Belanja Modal :	27.907.000						
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tosari	4 Unit		a. Belanja Operasi :	26.569.356	DAU		4 Unit		29.226.292	
										>Belanja Pegawai :							
										>Belanja barang & jasa :							
										b. Belanja Modal :	26.569.356						
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kecamatan Tosari	100%			39.554.220			100%		43.509.642	
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tosari	12 Laporan		a. Belanja Operasi :	32.054.220	DAU		12 Laporan		35.259.642	
										>Belanja Pegawai :	32.054.220						
										>Belanja barang & jasa :	32.054.220						
										b. Belanja Modal :							
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tosari	12 Laporan		a. Belanja Operasi :	7.500.000	DAU		12 Laporan		8.250.000	
										>Belanja Pegawai :	7.500.000						
										>Belanja barang & jasa :	7.500.000						
										b. Belanja Modal :							
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Kecamatan Tosari	100%			165.073.360			100%		181.580.696	
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tosari	10 Unit		a. Belanja Operasi :	125.032.100	DAU		10 Unit		137.535.310	
										>Belanja Pegawai :							
										>Belanja barang & jasa :	125.032.100						
										b. Belanja Modal :							
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Tosari	4 Unit		a. Belanja Operasi :	7.500.000	DAU		4 Unit		8.250.000	
										>Belanja Pegawai :							
										>Belanja barang & jasa :	7.500.000						
										b. Belanja Modal :							
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tosari	5 Unit			10.000.000	DAU		5 Unit		11.000.000	

						Pembangunan di Desa			>Belanja barang & jasa : 8.097.500 b. Belanja Modal :				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tosari	6 Laporan	a. Belanja Operasi : 31.132.500 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 31.132.500 b. Belanja Modal :	31.132.500	DAU	6 Laporan	34.245.750
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Tosari	100 Keluarga		10.000.000		100 Keluarga	11.000.000
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	Kecamatan Tosari	50 Keluarga	a. Belanja Operasi : 5.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000 b. Belanja Modal :	5.000.000	DAU	50 Keluarga	5.500.000
					Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan	Kecamatan Tosari	50 Keluarga	a. Belanja Operasi : 5.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000 b. Belanja Modal :	5.000.000	DAU	50 Keluarga	5.500.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	Kecamatan Tosari	100%		25.806.250		100%	28.386.875
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	Kecamatan Tosari	100%		25.806.250		100%	28.386.875
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kecamatan Tosari	12 Laporan	a. Belanja Operasi : 15.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 15.000.000 b. Belanja Modal :	15.000.000	DAU	12 Laporan	16.500.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tosari	12 Laporan	a. Belanja Operasi : 10.806.250 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 10.806.250 b. Belanja Modal :	10.806.250	DAU	12 Laporan	11.886.875
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	Kecamatan Tosari	100%		10.000.000		100%	11.000.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tosari	150 Orang		10.000.000		150 Orang	11.000.000
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Tosari	150 Orang	a. Belanja Operasi : 10.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 10.000.000 b. Belanja Modal :	10.000.000	DAU	150 Orang	11.000.000
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Kecamatan Tosari	100%		30.000.000		100%	33.000.000

					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	Kecamatan Tosari	100%	30.000.000			100%	33.000.000
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang	Kecamatan Tosari	12 Dokumen	8.000.000	DAU		12 Dokumen	8.800.000
									a. Belanja Operasi : 8.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 8.000.000 b. Belanja Modal :				
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tosari	12 Dokumen	8.000.000	DAU		12 Dokumen	8.800.000
									a. Belanja Operasi : 8.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 8.000.000 b. Belanja Modal :				
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Tosari	10 Dokumen	6.000.000	DAU		10 Dokumen	6.600.000
									a. Belanja Operasi : 6.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 6.000.000 b. Belanja Modal :				
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tosari	15 Dokumen	8.000.000	DAU		15 Dokumen	8.800.000
									a. Belanja Operasi : 8.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 8.000.000 b. Belanja Modal :				
									a. Total Belanja Operasi : 2.652.712.049 >Belanja Pegawai : 1.668.242.459 >Belanja barang & jasa : 984.469.590 b. Total Belanja Modal : 83.168.016				
									Total Belanja PD : 2.735.880.065,00				

TABEL TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Pasuruan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Subkegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode P-Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				5	6	7	8	9=8/7x100%	10= 6+8	11=10/5x100%										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	12	13	
1	7	KECAMATAN																		
2	701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
3	70101		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	300,00	Rp 250.422.513.659	180,00	Rp 3.972.279.177	100,00	Rp 2.771.444.603	13,84	Rp 292.504.224	13,84%	10,55%	193,84	Rp 4.264.783.401	64,61%	1,70%			
4	701012,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	300,00	Rp 3.990.883	145,00	Rp 2.100.300	100,00	Rp 1.890.383	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	145,00	Rp 2.100.300	48,33%	52,63%			
5	701012,0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12,00	Rp 3.451.500	7,00	Rp 2.100.300	4,00	Rp 1.351.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	7,00	Rp 2.100.300	58,33%	60,85%			
6	701012,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)	300,00	Rp 6.223.578.855	168,00	Rp 3.407.622.209	100,00	Rp 2.330.052.230	14,34	Rp 261.994.034	14,34%	11,24%	182,34	Rp 3.669.616.243	60,78%	58,96%			
7	701012,0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	238,00	Rp 4.722.979.479	27,00	Rp 2.754.949.609	210,00	Rp 1.482.024.054	36,00	Rp 210.594.034	17,14%	14,21%	63,00	Rp 2.965.543.643	26,47%	62,79%			
8	701012,0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	36,00	Rp 897.600.000	23,00	Rp 588.000.000	12,00	Rp 308.400.000	2,00	Rp 51.400.000	16,67%	16,67%	25,00	Rp 639.400.000	69,44%	71,23%			
9	701012,0203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	36,00	Rp 93.240.000	24,00	Rp 59.265.000	12,00	Rp 34.560.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	24,00	Rp 59.265.000	66,67%	63,56%			
10	701012,0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	12,00	Rp 2.824.000	6,00	Rp 2.122.800	4,00	Rp 805	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	6,00	Rp 2.122.800	50,00%	75,17%			
11	701012,0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	54,00	Rp 3.836.200	26,00	Rp 3.284.800	18,00	Rp 1.164.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	26,00	Rp 3.284.800	48,15%	85,63%			
12	701012,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	300,00	Rp 93.649.004	175,00	Rp 13.289.222	100,00	Rp 40.920.724	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	175,00	Rp 13.289.222	58,33%	14,19%			
13	701012,0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	19,00	Rp 21.264.880	48,00	Rp 11.250.360	1,00	Rp 5.727.600	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	48,00	Rp 11.250.360	252,63%	52,91%			
14	701012,0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	6,00	Rp 43.699.840	2,00	Rp 2.038.862	4,00	Rp 20.695.840	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	2,00	Rp 2.038.862	33,33%	4,67%			
15	701012,051	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)	1,00	Rp 21.601.275	0,00	Rp -	1,00	Rp 7.414.275	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	0,00	Rp -	0,00%	0,00%			
16	701012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	300,00	Rp 330.458.012	179,00	Rp 194.990.156	100,00	Rp 128.343.042	15,94	Rp 17.257.000	15,94%	13,45%	194,94	Rp 212.247.156	64,98%	64,23%			
17	701012,0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15,00	Rp 15.585.000	10,00	Rp 11.668.500	2,00	Rp 3.908.000	1,00	Rp 1.480.000	50,00%	37,87%	11,00	Rp 13.148.500	73,33%	84,37%			
18	701012,0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36,00	Rp 11.082.040	25,00	Rp 7.594.670	5,00	Rp 4.366.000	1,00	Rp 1.241.000	20,00%	28,42%	26,00	Rp 8.835.670	72,22%	79,73%			
19	701012,0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3,00	Rp 8.064.000	2,00	Rp 1.750.000	1,00	Rp 3.196.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	2,00	Rp 1.750.000	66,67%	21,70%			
20	701012,0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	75,00	Rp 55.282.300	65,00	Rp 41.236.600	4,00	Rp 21.013.000	1,00	Rp 7.625.000	25,00%	36,29%	66,00	Rp 48.861.600	88,00%	88,39%			
21	701012,0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	28,00	Rp 27.790.980	20,00	Rp 17.215.300	4,00	Rp 10.540.000	1,00	Rp 1.176.000	25,00%	11,16%	21,00	Rp 18.391.300	75,00%	66,18%			
22	701012,0606	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	24,00	Rp 7.200.000	13,00	Rp 3.600.000	12,00	Rp 3.600.000	1,00	Rp 300	8,33%	0,01%	14,00	Rp 3.600.300	58,33%	50,00%			
23	701012,0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	874,00	Rp 185.388.650	716,00	Rp 112.130.086	12,00	Rp 61.655.000	1,00	Rp 5.435.000	8,33%	8,82%	717,00	Rp 117.565.086	82,04%	63,42%			
24	701012,07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kagatan)	102,00	Rp 86.113.588	2,00	Rp 14.000.000	100,00	Rp 41.191.788	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	2,00	Rp 14.000.000	1,96%	16,26%			
25	701012,0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6,00	Rp 69.075.760	3,00	Rp 14.000.000	3,00	Rp 24.153.960	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	3,00	Rp 14.000.000	50,00%	20,27%			
26	701012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	124,00	Rp 99.378.761	22,00	Rp 47.200.490	100,00	Rp 38.688.661	14,07	Rp 4.099.190	14,07%	10,60%	36,07	Rp 51.299.680	29,09%	51,62%			
27	701012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	96,00	Rp 89.830.300	82,00	Rp 52.609.493	12,00	Rp 29.140.200	2,00	Rp 4.099.190	16,67%	14,07%	84,00	Rp 56.708.683	87,50%	63,13%			
28	701012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	300,00	Rp 451.188.300	175,00	Rp 293.076.800	100,00	Rp 190.357.775	7,81	Rp 9.154.000	7,81%	4,81%	182,81	Rp 302.230.800	60,94%	56,99%			

29	701012,0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	34,00	Rp 330.228.100	22,00	Rp 238.775.300	10,00	Rp 102.410.200	2,00	Rp 9.154.000	20,00%	8,94%	24,00	Rp 247.929.300	70,59%	75,08%		
30	701012,0905	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel Yang dipelihara (Unit)	5,00	Rp 5.960.000	0,00	Rp -	5,00	Rp 2.000.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	0,00	Rp -	0,00%	0,00%		
31	701012,0906	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30,00	Rp 12.763.300	19,00	Rp 9.263.300	6,00	Rp 5.000.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	19,00	Rp 9.263.300	63,33%	72,58%		
32	701012,0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3,00	Rp 29.017.925	2,00	Rp 45.037.700	1,00	Rp 7.728.600	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	2,00	Rp 45.037.700	66,67%	155,21%		
33	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	300,00	Rp 18.681.718.803	183,77	Rp 79.910.500	100,00	Rp 120.014.455	13,98	Rp 12.648.600	13,98%	10,54%	#VALUE!	Rp 92.559.100	#VALUE!	0,50%		
34	701022,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan (laporan)	210,00	Rp 270.134.955	138,00	Rp 79.910.500	10,00	Rp 120.014.455	4,00	Rp 12.648.600	40,00%	10,54%	142,00	Rp 92.559.100	67,62%	34,26%		
35	701022,0101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	6,00	Rp 44.441.600	2,00	Rp 27.643.000	4,00	Rp 14.448.600	4,00	Rp 12.648.600	100,00%	87,54%	6,00	Rp 40.291.600	100,00%	90,66%		
36	701022,0102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	15,00	Rp 196.182.500	5,00	Rp 52.567.500	6,00	Rp 76.055.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	5,00	Rp 52.567.500	33,33%	26,80%		
37	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik (%)	300,00	Rp 69.902.898.346	195,00	Rp 90.615.600	100,00	Rp 94.745.178	5,02	Rp 1.785.000	5,02%	1,88%	200,02	Rp 92.400.600	66,67%	0,13%		
38	701032,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan (laporan)	208,00	Rp 379.689.578	196,00	Rp 90.615.600	8,00	Rp 94.745.178	1,00	Rp 1.785.000	12,50%	1,88%	197,00	Rp 92.400.600	94,71%	24,34%		
39	701032,0103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	31,00	Rp 320.519.400	17,00	Rp 90.615.600	8,00	Rp 35.575.000	1,00	Rp 1.785.000	12,50%	5,02%	18,00	Rp 92.400.600	58,06%	28,83%		
40	70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas (%)	300,00	Rp 5.412.232.030	150,00	Rp 58.111.300	100,00	Rp 16.837.150	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	150,00	Rp 58.111.300	50,00%	1,07%		
41	701042,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan (%)	300,00	Rp 76.793.150	200,00	Rp 58.111.300	100,00	Rp 16.837.150	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	200,00	Rp 58.111.300	66,67%	75,67%		
42	701042,0101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi VERTikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\ (laporan)	21,00	Rp 33.937.500	14,00	Rp 25.285.000	4,00	Rp 6.187.500	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	14,00	Rp 25.285.000	66,67%	74,50%		
43	701042,0102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12,00	Rp 40.201.000	7,00	Rp 32.836.300	4,00	Rp 7.995.000	0,00	Rp -	0,00%	0,00%	7,00	Rp 32.836.300	58,33%	81,68%		

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, Maka perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategi yang telah dibuat. Sosialisai ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan da dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program kegiatan indkatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kea rah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF